

Blok Politik: Menaikkan Kelas Demokrasi Kita

WILLY ADITYA
Politisi Partai NasDem

DEMOKRASI Indonesia hari ini tidak sedang runtuh – tetapi berputar di tempat. Ia bekerja secara prosedural: pemilu berjalan, kekuasaan berganti, institusi berdiri. Namun, di balik itu semua, politik kita cenderung kehilangan kesinambungan. Ia bergerak dalam siklus lima tahunan yang repetitif: datang, bertarung, menang atau kalah, lalu kembali ke titik awal.

Setiap pemilu, kita seperti memulai dari nol. Setiap periode kekuasaan, kita seperti mengulang pelajaran yang sama. Dalam situasi seperti ini, pertanyaan yang layak diajukan bukan lagi apakah demokrasi kita berjalan, melainkan: ke mana arah demokrasi ini bergerak?

BELAJAR DARI SEJARAH

Jika kita menengok ke belakang, perjalanan politik Indonesia justru menunjukkan bahwa arah bangsa tidak selalu lahir dari kompetisi semata, tetapi dari kemampuan membangun konsolidasi. Dalam forum BPUPKI, para pendiri bangsa memperdebatkan dasar negara dengan tajam, bahkan ideologis. Namun, tujuan akhirnya bukan saling meniadakan, melainkan menemukan titik temu yang dapat menjadi fondasi bersama. Di sanalah embrio *common ground* Indonesia lahir.

Pada periode berikutnya, sejarah mencatat upaya-upaya menghimpun kekuatan politik dalam skala yang lebih luas. Misalnya, Front Nasional pada masa Sukarno, atau Sekretariat Bersama Golkar pada periode berikutnya. Keduanya merupakan contoh bagaimana negara berupaya membangun stabilitas melalui konsolidasi kekuatan politik dan sosial.

Keduanya memang bukan tanpa catatan kritis. Bahkan dalam ba-

nyak hal, ia menyisakan problem serius terkait dengan dominasi dan keterbatasan ruang demokrasi. Namun, ada satu pelajaran penting yang tetap relevan: stabilitas dan arah kebangsaan membutuhkan konsolidasi, bukan sekadar kompetisi yang tak berujung.

Hari ini kita hidup dalam sistem presidensial dengan konfigurasi multipartai yang sangat terbuka. Secara desain, sistem ini menempatkan presiden dan parlemen sebagai dua institusi dengan legitimasi yang setara, sekaligus fungsi saling mengimbangi. Namun, dalam praktiknya, kita justru mengadopsi logika parlementer melalui koalisi yang cair dan transaksional.

Koalisi dibangun bukan atas dasar kesepahaman programatik, melainkan sebagai instrumen pembagian kekuasaan. Ia bersifat jangka pendek, mudah berubah, dan sering kali kehilangan arah setelah tujuan elektoral tercapai. Akibatnya, politik kita menghadapi dua problem sekaligus: fragmentasi tanpa struktur di satu sisi dan kerja sama tanpa fondasi di sisi yang lain. Demokrasi memang berjalan, tetapi sulit untuk berkembang, ia terus terperangkap dalam karakternya yang prosedural.

Di titik inilah gagasan blok politik menjadi relevan untuk dipertimbangkan. Blok politik bukanlah peleburan partai; bukan pula koalisi jangka pendek. Ia adalah kerja sama strategis yang dibangun di atas kesepahaman programatik dan visi jangka menengah-panjang tanpa menghilangkan otonomi masing-masing entitas politik.

Jika koalisi bersifat reaktif, maka blok politik bersifat *by design*. Jika koalisi berorientasi elektoral, maka blok politik berorientasi struktural. Dalam kerangka ini, blok politik



berfungsi sebagai wadah konsolidasi gagasan, ruang koordinasi kebijakan, sekaligus jembatan antara stabilitas dan demokrasi.

LEBIH DARI PEMILU

Selama ini, politik kita terlalu didominasi oleh preferensi elektoral. Siapa dipilih, siapa menang, hingga

siapa mendapatkan kursi. Padahal demokrasi bukan sekadar pemilu. Ia membutuhkan sesuatu yang lebih mendasar: *common ground*.

Common ground adalah kesepakatan minimal tentang arah bangsa –tentang apa yang harus dijaga bersama, terlepas dari perbedaan (paham) politik yang ada. Blok politik memungkinkan ruang untuk menyusun kesepakatan tersebut sebelum kompetisi terjadi. Ia menjadi ruang di mana berbagai entitas sosial bertemu guna berdialog di dalam soal-soal kepolitikan. Dengan demikian, politik tidak lagi semata-mata tentang menang atau kalah, tetapi tentang apa yang mesti diperjuangkan di ruang publik.

Demokrasi yang matang juga tidak hanya ditopang oleh partai politik. Ia membutuhkan interaksi yang sehat antara *political society* dan *civil society*. Selama ini, relasi keduanya cenderung kaku dan berjarak. *Civil society* berada di luar sebagai pengkritik, sementara *political society* berada di dalam se-

bagai pengambil keputusan suatu kebijakan.

Blok politik membuka kemungkinan untuk mempertemukan keduanya dalam ruang yang lebih cair dan produktif. Ruang di mana gagasan diuji secara terbuka, pengalaman lapangan bertemu dengan desain kebijakan, dan perbedaan menjadi sumber pembelajaran. Dari ruang seperti ini, kita bisa mulai membangun sesuatu yang selama ini jarang hadir dalam politik kita: mimpi bersama tentang masa depan Republik yang lebih baik dari waktu ke waktu.

Salah satu kelemahan demokrasi kita hari ini ialah adanya jarak antara aspirasi dan kebijakan. Banyak gagasan publik berhenti sebagai tuntutan, tanpa pernah menjadi kebijakan yang operasional. Di sisi lain, kebijakan sering kali kehilangan basis legitimasi sosialnya.

Konsep blok politik dapat menjadi jembatan di antara keduanya. Ia memungkinkan agenda publik diterjemahkan ke dalam kerangka yang lebih sistematis, rasional, dan implementatif di berbagai level kebijakan. Dengan cara ini, demokrasi tidak hanya menjadi arena ekspresi, tetapi juga mekanisme produksi solusi.

Di dalam blok politik, demokrasi deliberatif lebih memungkinkan terjadi. Di sini, aspirasi tidak lagi 'disampaikan', melainkan menjadi bagian dari 'agenda politik' bersama. Aspirasi tidak lagi berasal dari 'luar', tetapi 'lahir' dari dalam blok sebagai program politik bersama. Lebih dari itu, dukungan dan kekuatan *political society* menjadi lebih autentik. Kekuatannya tidak sekadar berasal dari pengakuan formal yuridis belaka. Kaki-kaki dukungan akan lahir dari akar rumput dengan sebenar-benarnya. Suara-suara di masa elektoral pun tidak lagi berasal dari perilaku transaksional dan sejenisnya.

Lebih jauh lagi, politik tidak lagi hanya soal dan seputar memenangkan kursi kekuasaan belaka. Politik akan mewujudkan dalam ekspresi yang lebih esensial: bahwa politik adalah tentang membangun kehidupan bersama yang lebih rasional dan beradab. Bahwa politik bukan semata urusan kekuasaan lima tahunan. Politik adalah juga ruang bagi segenap warga negara untuk memanifestasikan partisipasinya.

NAIK KELAS

Jika *common ground*, ruang kolaborasi, dan saluran agenda publik dapat dibangun, maka demokrasi kita tidak hanya berjalan, tetapi juga akan berkembang. Ia bergerak dari praktik prosedural menuju praksis yang melahirkan substansi; dari praktik yang transaksional menuju kerja yang programatik; dari gerak yang fragmentatif menjadi lebih kolaboratif. Inilah yang dapat kita sebut sebagai demokrasi yang naik kelas; demokrasi yang tidak hanya mengelola kompetisi, tetapi juga mampu membangun arah.

Pada akhirnya, politik bukan sekadar tentang siapa yang berkuasa, tetapi tentang bagaimana kekuasaan itu diarahkan. Blok politik bukanlah tujuan akhir. Ia adalah alat dan juga iktiar untuk memperbaiki cara kita berpolitik, sekaligus membuka ruang bagi lahirnya imajinasi baru tentang apa yang disebut 'republik'.

Sejarah telah menunjukkan bahwa bangsa ini mampu dan kerap menemukan titik temu di tengah perbedaan. Tantangan kita hari ini ialah menunaikan tugas yang sama, tetapi dalam kerangka demokrasi yang lebih matang: lebih terbuka, lebih rasional, dan lebih berkeadilan. Karena, tanpa arah bersama, demokrasi hanya akan menjadi rutinitas. Dan, tanpa mimpi bersama, politik hanya akan menjadi perputaran tanpa makna dan terus membuat kita tinggal di kelas yang sama.

Perlindungan Perempuan dari Praktik Mafia Tanah

AARCE TEHUPEIORY
Guru Besar Hukum Agraria dan
Pertanahan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia

PERSOALAN mafia tanah di Indonesia bukan sekadar konflik kepemilikan lahan, tetapi telah berkembang menjadi kejahatan terstruktur yang merugikan masyarakat luas. Di balik sengketa tanah terdapat kelompok rentan yang sering kali menjadi korban dan paling terdampak, yakni perempuan.

Dalam konteks ini, upaya memberantas mafia tanah dalam konteks hukum agraria harus berjalan seiring dengan perlindungan hukum terhadap perempuan, atau hukum agraria berperspektif gender.

Perempuan kerap memiliki posisi yang lemah dalam penguasaan dan kepemilikan tanah. Faktor budaya patriarki, minimnya akses terhadap

informasi hukum, serta keterbatasan ekonomi membuat mereka rentan kehilangan hak atas tanah. Dalam banyak kasus, perempuan tidak tercantum sebagai pemilik sah dalam sertifikat, meskipun mereka memiliki peran penting dalam mengelola dan mempertahankan lahan keluarga.

Dalam praktik mafia tanah, perempuan sering kali menjadi korban ganda. Ketika tanah mereka diserobot oleh mafia, mereka tidak hanya kehilangan aset ekonomi, tetapi juga sumber penghidupan dan identitas sosial. Ironisnya, proses hukum yang ada belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang adil dan responsif terhadap kondisi tersebut.

Hukum agraria Indonesia sejatinya telah memberikan dasar untuk perlindungan hak atas tanah bagi kaum perempuan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) UUPA. Namun,

dalam praktiknya, implementasi hukum sering kali belum sensitif terhadap kebutuhan perempuan.

Oleh karena itu, negara perlu mengintegrasikan perspektif gender dalam kebijakan pertanahan. Ini bukan sekadar soal keadilan bagi perempuan, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan.

PEREMPUAN DAN KONFLIK TANAH

Tanah memiliki nilai ekonomi tinggi, yang memicu sengketa pertanahan. Salah satu penyebab sengketa ialah keterlibatan mafia tanah dalam pengambilalihan hak atau peralihan hak. Mafia tanah juga menciptakan spekulasi harga tanah, karena tanah ditempatkan sebagai komoditi investasi yang menjanjikan, sehingga menarik minat pihak-pihak tertentu untuk memiliki dan menguasainya dengan berbagai cara, termasuk dengan melanggar hukum.

Kepemilikan dan penguasaan tanah yang dilakukan dengan usaha yang tidak sah ini tidak hanya terjadi pada tanah-tanah di daerah pinggiran, tetapi terjadi juga di kota-kota besar. Tanah-tanah yang ditelantarkan oleh pemiliknya selalu menjadi incaran para mafia tanah untuk menyerobot dan menerbitkan sertifikat tanah atas nama pihak lain. Kejahatannya dilakukan secara terorganisasi, maka sulit dilacak secara hukum. Mereka sering kali berlindung di balik penegakan dan pelayanan hukum.

Banyaknya korban mafia tanah yang dialami perempuan menunjukkan sistem perlindungan hukum agraria masih belum berpihak kepada hak-hak perempuan atas tanah. Demikian juga dalam penanganan sengketa tanah yang ditimbulkan oleh praktik mafia tanah. Perempuan selalu dirugikan karena dianggap tidak memiliki hak dan tidak mewakili pemegang hak.

Kasus di Surabaya yang menimpa nenek Elna Widjajanti, berusia 80 tahun, yang diusir oleh preman, menjadi perhatian publik. Juga kasus yang dialami Mursiti (60 tahun) di Bekasi dan kasus Siti Hawa (67

tahun), seorang perempuan adat Rempang yang ditetapkan menjadi tersangka dalam konflik tanah adat. Semua kasus tersebut memperlihatkan bagaimana perempuan menjadi kelompok paling rentan, baik sebagai sasaran mafia tanah maupun penggusuran.

Perlindungan hak atas tanah bagi kaum perempuan dapat dimulai dengan penerapan *gender mainstreaming*, sehingga penerapannya tidak bias gender dan tidak menimbulkan masalah baru pada perempuan yang berkonflik dalam masalah pertanahan. Terlebih lagi di era digitalisasi sertifikat tanah, yang ditujukan untuk memberi kepastian hukum bagi pemegang haknya, maka perlindungan bagi kaum perempuan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari modernisasi pendaftaran tanah.

STRATEGI KEBIJAKAN

Pencegahan kasus-kasus tanah yang melibatkan mafia tanah untuk melindungi perempuan agar mendapatkan keadilan, harus mencakup aspek legal formal, teknologi informasi, dan penegakan hukum yang tegas, serta pembaruan regulasi. Se-

lain itu, diperlukan penyederhanaan birokrasi di bidang pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, prinsip penghormatan terhadap hak-hak atas tanah bagi perempuan, dan prinsip keadilan.

Peranan Satgas Mafia Tanah yang sudah ada dalam pencegahan dan pemberantasan praktik mafia tanah harus diperkuat dengan pembentukan komisi antimafia tanah. Jika perlu membentuk lembaga peradilan tersendiri dalam hal penyelesaian sengketa tanah, dengan melibatkan para akademisi, untuk mencari formula yang tepat agar persoalan mafia tanah dapat diatasi hingga ke akarnya.

Upaya melawan mafia tanah tidak akan efektif kalau hanya fokus pada penindakan pidana. Harus ada pendekatan sistemik melalui reformasi administrasi pertanahan dan penegakan hukum yang konsisten. Integrasi perspektif gender dalam kebijakan pertanahan, termasuk edukasi hukum bagi masyarakat, terutama perempuan, agar sadar haknya. Kalau tidak, kita hanya akan 'memadamkan kebakaran kecil tanpa menyetujui akar masalahnya'.

PARTISIPASI OPINI

Kirimkan ke email: opini@mediaindonesia.com atau opinimi@yahoo.com atau fax: (021) 5812105, (Maksimal 5.500 karakter tanpa spasi. Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon, foto kopi KTP, foto diri, dan NPWP). Setiap materi baik artikel, tulisan, maupun foto, yang telah ditampilkan di harian *Media Indonesia* dapat dimuat kembali baik dalam format digital maupun nongdigital yang tetap merupakan bagian dari harian *Media Indonesia*.

MEDIA
INDONESIA

A Part of
MEDIA GROUP
NETWORK

Pendiri: Drs. H. Teuku Yousli Syah MSI (Alm)
Direktur Utama: Arief Suditomo
Direktur Pemberitaan/Penanggung Jawab:
Abdul Kohar

Dewan Redaksi Media Group:

Ketua: Eiman Saragih (merangkap anggota)
Wakil Ketua: Arief Suditomo (merangkap anggota)
Anggota: Mohammad Mirdal Akib, Abdul Kohar,
Gaudensius Suhardi, Budiyanto, Iskandar Zulkarnain,
Suryopratomo, Usman Kansong

Dewan Pengarah: Lestari Moerdijat, Saur M. Hutabarat,
Adrianto Machribie

Deputi Direktur Pemberitaan: Aries Fadhillah
Kepala Divisi Pemberitaan: Ahmad Puntio

Kepala Divisi Multimedia & Artistik: Hariyanto
Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Henri Salomo,
Windy Dyah Indriantari

Kepala Sekretariat Redaksi: Eni Kartinah
Redaktur: Agus Mulyawan, Akhmad Mustain,
Denny Wijaksana, Basuki Eka P. Bintang Krisanti,
Denny Parsaulian Sinaga, Heryadi, Indrastuti, Ivan Sihombing,
Mirza Andreas, Sitria Hamid

Staf Redaksi: Abdillah M. Marzuqi, Agung Wibowo,
Akmal Fauzi, Andhika Prasetyo, Atalya Puspa, Budi Ernanto,
Cahya Mulyana, Despihan Nurhidayat, Dhika Kusuma Winata,
Fathurozok, Ferdian Ananda Majni, Gana Buana, Golda Eksa,
Haufan H. Salengke, Infa Firdausya, Indriyani Astuti,
Insi Nantika Jelita, M. Ilham Ramadhan Avisena,
M. Iqbal Al Machmudi, Mohamad Farhan Zhuhri,
Permana Pandega Jaya, Putri Anisa Yuliani, Putri Rosmalia
Octaviani, Rahmatul Fajri, Ramdani, Rifaldi Putra Irinto,
Siti Retno Wulandari, Suryani Wandari Putri Pertiwi, Thalatie Yani,
Usman Iskandar, Wisnu Arto Subani

DIVISI TABLOID, MAJALAH, DAN BUKU (PUBLISHING)
Asisten Kepala Divisi: Iis Zatinah
Redaktur: Eni Kartinah

CONTENT ENRICHMENT

Periset: Desi Yasmimi S, Gurit Adi Suryo
Bahasa:
Redaktur: Adang Iskandar, Dony Tjiptonugroho

ARTISTIK

Asisten Kepala Divisi:
Redaktur: Annette Natalia, Briyanbodo Hendro,
Marionsandes NKR
Staf Artistik: Amiluhur, Ananto Prabowo, Dedy, Duta Amarta,
Nurul Arohmat, Seno Aditya, Tutik Sunarsih
Olah Foto: Ade Rian H

BISNIS & PENGEMBANGAN

Direktur Bisnis & Pengembangan: G. Bernhard
Rotinsulu
Kepala Divisi Sales & Marketing: Wendy Rizanto
Perwakilan Bandung: Sulaeman Gojali (022)
4210500; Surabaya: (031) 5667359;
Yogyakarta: Andi Yudhanto (0274) 523167

KORESPONDEN

Banten: Sumantri Handoyo (Tangerang)
Syarief Oebaidillah (Tangerang Selatan)
Jawa Barat: Dede Susianti (Bogor),
Naviandri, Sugeng Sumaryadi (Bandung),
Kisar Rajagukguk (Depok),
Benny Bastiandy, SE (Cianjur/Sukabumi),
Depi Gunawan (Cimahi), Nurul Hidayah (Cirebon),
Reza Sunarya (Purwakarta), Kristiadi (Tasikmalaya)
Jawa Tengah: Haryanto (Semarang),
Akhmad Safuan (Pekalongan), Djoko Sardjono (Klaten),
Widjajadi (Solo), Liliek Dharmawan (Purwokerto),
Tosiani S (Temanggung), Supardi Rasban (Brebes)
Yogyakarta: Agus Utantoro, Ardi Teristi Hardi
Jawa Timur: Faishol Taselan (Surabaya),
Bagus Suryo Nugroho (Malang),
Heri Susetyo (Sidoarjo),
Muhammad Ahmad Yakub (Bojonegoro),
Muhammad Ghozi (Madura)
Aceh: Amiruddin Abdullah (Pidie),
Sumatra Utara: Apul Iskandar (Pematangsiantar),
Yoseph Pencawan (Medan), Januari Hutabarat (Taput)

Sumatra Barat: Yose Hendra (Padang)
Kepri: Hendry Kremer (Batam)
Riau: Rudi Kumiawansyah (Pekan Baru)
Bangka Belitung: Rendy Ferdiansyah (Pangkalpinang)
Bengkulu: Marlansyah
Jambi: Solmi
Kalimantan Tengah: Surya Suryanti (Palangkaraya)
Kalimantan Selatan: Denny Susanto (Banjarmasin)
Sulawesi Tengah: M Taufan SP Bustan (Palu)
Sulawesi Selatan: Lina Herlina (Makassar)
NTB: Yusuf Riaman (Mataram)
Bali: Arnoldus Dhae (Denpasar), Gede Ruta Suryana (Kuta)
NTT: Alexander Paulus Taum (Lembata), Palce Amalo (Kupang)
Papua: Marcellinus Kelen (Jayapura)
Papua Barat Daya: Martinus Solo

Telepon Layanan Pembaca: (021) 5821303

Telepon Iklan: (021) 5812113, 5801480

Fax Iklan: (021) 5812107, 5812110

Fax Customer Service: (021) 5820476

Telepon Sirkulasi: (021) 5812095, Telepon Distribusi:

(021) 5812077, Telepon Percetakan: (021) 5812086,

Harga Langganan: Rp120.000 per bulan (Jabodetabek),

di luar P. Jawa + ongkos kirim, No. Rekening Bank:

a.n. PT Citra Media Nusa Purnama Bank Mandiri

- Cab. Taman Kebon Jeruk: 117-009-500-9098;

BCA - Cab. Sudirman: 035-306-5014, Diterbitkan oleh:

PT Citra Media Nusa Purnama, Jakarta, Alamat Redaksi/Tata

Usaha/Iklan/Sirkulasi: Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya

Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11520